



**Membangun Wawasan Kebangsaan yang Religius Demi Mewujudkan Integrasi Nasional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan**

Bali Widodo ✉

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima september 2019 Revisi Oktober 2019 Dipublikasikan November 2019</p>	<p>Ketidaksamaan dalam cara pandang setiap warga negara dalam memaknai keberagaman dalam konteks negara-bangsa Indonesia dapat menimbulkan persoalan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Artikel ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian tentang membangun wawasan kebangsaan yang religius melalui pendidikan kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif terhadap realitas yang ada dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah yang alamiah dengan melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial dalam bentuk telaah kepustakaan dan pengamatan dari suatu peristiwa. Penelitian ini tidak berangkat dari suatu teori karena memang tidak untuk membuktikan suatu teori, yang ingin didapatkan bukan bagaimana yang seharusnya tetapi bagaimana adanya, sesuai gambaran nyata yang ada di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang berwawasan kebangsaan yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Kesadaran warga negara bahwa negara ini dibangun atas perbedaan inilah yang kemudian dapat mewujudkan integrasi nasional.</p>
<p><b>Keywords :</b> <i>Citizenship Education, Nationality Insight, National Integration, Religious</i></p>	<p><b>ABSTRACT</b> <i>building a religious nation insight for reaching national integration through education of citizenship. Inequality in the perspective of every citizen in interpreting diversity in the context of the Indonesian nation-state can lead to problems that lead to national disunity. This article aims to convey the results of research on building a religious national outlook through civic education. The research method used is a type of qualitative research that is descriptive of existing reality intending to obtain natural-scientific truth by interpreting social phenomena in the form of literature review and observation of an event. This research does not depart from theory because it is not to prove a theory, what is wanted is not how it should be but how it is, according to the real picture in society. The results showed that Citizenship Education with a nationalist vision based on the value of the Almighty God raised the awareness that differences in Indonesian society were gifts from God Almighty to be grateful for. Citizens' awareness that this country was built on this difference can then realize national integration.</i></p>
<p><b>How to Cite :</b> Bali Widodo(2019). Membangun wawasan kebangsaan yang religius Demi mewujudkan integrasi nasional Melalui pendidikan kewarganegaraan. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 4(3), pp. 13-24. DOI: 10.24269/jpk.v4.n3.2019.pp13-24</p>	
<p>✉ <b>Alamat korespondensi:</b> Institut Teknologi Nasional Bandung</p>	
<p>✉ <b>E-mail:</b> baliw@itenas.ac.id</p>	

Copyright © 2019 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**PENDAHULUAN**

Paham Kebangsaan atau nasionalisme Indonesia tidak lepas dari adanya penjajahan atau kolonialisme di bumi nusantara ini. Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme sebagai bentuk penolakan terhadap berbagai tekanan fisik maupun psikis inilah yang

pada akhirnya memunculkan nasionalisme (Silaban, 2012: 2)

Pengertian bangsa pada umumnya adalah mereka yang memiliki kesamaan dalam asal keturunan, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jika pengertian bangsa tersebut dikaitkan dengan pengertian bangsa Indonesia tentu tidaklah cocok, mengingat bangsa Indonesia

memiliki latar belakang yang berbeda baik dari sisi keturunannya, budaya, bahasa, adat istiadat maupun agama yang di anutnya. Dengan demikian, pengertian bangsa dalam konteks bangsa Indonesia lebih dikaitkan dengan *political unity*, bukan pada *cultural unity* nya.

Menurut Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dibentuk Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia secara umum dapat dikemukakan bahwa ada empat kriteria yang pada hakikatnya menandai suatu bangsa yaitu: (1) adanya kehendak untuk secara sadar (keinsyafan) dari unsur masyarakat untuk bersatu, (2) memiliki tujuan hidup bersama (masa depan yang sejahtera dan bahagia bersama), (3) memiliki latar belakang sejarah yang sama, dan (4) memiliki suatu kesatuan wilayah sebagai ruang hidup (Martodirdjo, 2008: 3)

Jadi kriteria bangsa di atas adalah mereka yang memiliki kesadaran untuk hidup bersama meskipun dilatarbelakangi oleh perbedaan, memiliki latar belakang sejarah yang sama (dulunya pernah sama-sama dijajah dan berjuang bersama untuk melepaskan diri dari penjajahan), demi masa depan bersama yang cerah, yaitu masyarakat yang sejahtera dan bahagia dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan Tarigan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak kelompok etnis, budaya, adat istiadat, maupun agama yang dianutnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa (Tarigan, 2006: 41). Kondisi yang demikian ini menjadikan bangsa Indonesia di kenal sebagai bangsa yang multikultural bukan monokultural (Utami, Cahyono: 2017: 342). Melihat kondisi obyektif bangsa Indonesia tersebut maka wawasan kebangsaan yang merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang strategis ini hendaknya dijadikan semangat kebangsaan yang harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Meskipun harus diakui bahwa pada kenyataannya semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan secara kualitas. Menurut Amin (2015: 30) negara Indonesia adalah negara pluralistik, dimana jumlah etnis dan kelompoknya banyak, yang sudah barang tentu adat istiadat, budaya, agama, serta nilai-nilai kehidupan yang dianutnya pun banyak dan berbeda. Kondisi pluralistik inilah yang dapat menyebabkan terjadinya benturan nilai-nilai yang saling berbeda yang pada akhirnya memunculkan konflik horisontal (Lestari, 2015: 31)

Hal ini bisa dilihat misalnya masih adanya konflik atau pertikaian yang mengandung unsur SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan (Amirin, 2012: 9). Misalnya kasus tentang izin pembangunan gereja jemaat Gereja GKI Yasmin di Bogor yang merasa hak ibadahnya dihalangi. Benturan antar pemeluk agama (*inter-religius*) maupun antar pemeluk dalam sebuah agama (*intra-religius*) umat beragama, seringkali masih mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Contoh lainnya konflik horisontal atau tawuran pada tahun 2012 yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan juga ditengarai mengandung isu SARA padahal hanya dipicu hal yang sepele. Dalam keributan itu, dibawa-bawa isu etnis, yaitu warga Lampung dan Bali, sehingga pecah tawuran antar warga. Hal tersebut di atas mencerminkan masih terjadinya paradoks antara semangat kebangsaan, komitmen untuk tetap bersatu ini dengan berbagai kasus sosial dan politik di masyarakat yang mengarah pada perpecahan. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk membangun wawasan kebangsaan yang memiliki komitmen pada persatuan dalam keberagaman, dan keberagaman untuk kesatuan Indonesia (Martodirdjo, 2008: 1)

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan acuan bersama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini tampak dari pelaksanaannya yang bersifat imperatif atau memaksa. Pelanggarannya atas

pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dalam arti ada upaya untuk menggantinya dengan dasar negara yang lain akan dikenakan sanksi hukum yang tegas. Sebagai contoh misalnya, tindakan tegas ini diberikan terhadap Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo yang memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949, setelah dilakukan pengejaran dan berhasil di tangkap di gunung Rakutak, Jawa Barat akhirnya Karyosuwirdjo pun dihukum mati di pulau Ubi, Kepulauan Seribu. Contoh lainnya, adalah seorang yang bernama Achmad Aidit atau yang lebih dikenal dengan Dipa Nusantara Aidit yang lahir di daerah Tanjung Pandan, Belitung pada tanggal 30 Juli 1923, yang juga ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar Komunis melalui Partai Komunis Indonesia inipun berujung tragis karena dilakukan penindakan yang tegas oleh negara terhadap pelakunya.

Pancasila yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur agama merupakan sumber nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sumber nilai yang paling tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa yang beragama dan sadar akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tidak mudah terprovokasi yang bertujuan memecah belah bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai (*civic virtue*) diharapkan memiliki peran yang strategis dalam membangun wawasan kebangsaan yang religius. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membentuk warga yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*). Dengan kecerdasan spiritual yang dimilikinya setiap warga negara dapat memahami dan menghargai bahwa perbedaan itu adalah karya Tuhan yang indah. Perbedaan yang ada tidak jadi masalah ketika tidak dipermasalahkan, sebaliknya perbedaan akan jadi masalah ketika dipermasalahkan, dengan demikian perbedaan semestinya

tidak usah dipermasalahkan karena perbedaan itu suatu keniscayaan bagi bangsa ini.

#### **METODE**

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan kegiatan berpikir sistematis untuk menemukan kebenaran dalam upaya memecahkan masalah penelitian dengan secara terus menerus dengan menggunakan kegiatan inquiri secara alamiah, untuk mencari kebenaran ilmiah yang alamiah. Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan merujuk pada berbagai sumber kepustakaan dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Sumber kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, internet serta hasil penelitian terdahulu. Peneliti dalam menggali informasi bukan dari orang sebagai nara sumber, tetapi memperoleh informasi dari dokumen. Dokumen dibutuhkan untuk menelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Al Muchtar, 2015: 3).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***Sejarah Wawasan Kebangsaan Indonesia***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wawasan” diartikan sebagai pandangan, penglihatan, tinjauan atau cara pandang, cara penglihatan; sedangkan “kebangsaan” yang berasal dari kata dasarnya “bangsa” diartikan sebagai sekelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Secara harfiah Wawasan Kebangsaan dapat dimaknai bahwa cara pandang atau cara penglihatan suatu bangsa yang mengandung kemampuan dalam memahami diri dan lingkungannya serta berperilaku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya. Dalam konteks wawasan kebangsaan Indonesia, cara pandang yang dilakukan tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa

Indonesia sejak jaman penjajahan barat dan Jepang sampai dengan negara terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semangat kebangsaan Indonesia atau nasionalisme ini ditandai dengan berdirinya Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, meskipun semangat nasionalisme ini masih terbatas di tanah Jawa, Madura dan Bali. Wawasan kebangsaan Indonesia mulai mengkrystal sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang menyatakan diri sebagai satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Tampak jelas disini bahwa sekat-sekat perbedaan tidak ada lagi, dengan lebih lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun nilai dasar wawasan kebangsaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi:

- a) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Adanya tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu;
- c) Mencintai tanah air dan bangsa;
- d) Demokrasi atau kekuasaan tertinggi ditangan rakyat;
- e) Adanya rasa kesetiakawanan sosial;
- f) Masyarakat yang adil dan makmur (Suhady & Sinaga, 2006: 25)

Dari 6 (enam) nilai dasar tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa untuk tetap terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia diberi jaminan dalam memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya pemaksaan baik oleh negara maupun umat beragama lainnya, memiliki sikap cinta pada tanah air, sikap bela negara dan rela berkorban demi bangsa dan negara, serta kepedulian terhadap sesama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

### ***Integrasi Nasional Indonesia***

Istilah integrasi nasional, berasal dari dua kata “Integrasi” dan “Nasional”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “integrasi” diartikan sebagai pembauran atau penyatuan

hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah “nasional” diartikan sebagai kebangsaan, bersifat bangsa sendiri. Secara harfiah integrasi nasional dapat dimaknai sebagai suatu proses penyatuan atau pembauran dari berbagai aspek sosial budaya yang ada di masyarakat ke dalam satu kesatuan wilayah dan akan membentuk nantinya sebagai identitas bangsa.

Suhady dan Sinaga (2006: 39) menyatakan bahwa integritas nasional sebagai upaya penyatuan berbagai aspek sosial budaya bangsa ini harus dapat menjamin adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa. Adapun yang dimaksud dengan:

- a) Keselarasan; digambarkan sebagai suasana yang tenang, aman, nyaman, damai, tenteram lahir dan batin, tidak ada benturan-benturan yang berpotensi memecah belah bangsa. Masing-masing orang melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing.
- b) Keserasian; keberagaman etnis, budaya, adat istiadat, bahasa dan agama yang dianutnya digambarkan dalam suasana saling menghargai dan menghormati dengan penuh toleransi dan rasa kekeluargaan. Hal ini menggambarkan adanya keterpaduan antara berbagai unsur yang membentuk negara Indonesia.
- c) Keseimbangan; menggambarkan adanya perlakuan yang sama dari berbagai unsur-unsur yang ada dalam kehidupan bersama sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat, hak dan kewajiban, tugas dan wewenangnya sehingga tercipta suatu keadilan.

Integritas nasional meliputi 2 (dua) hal, yaitu yang bersifat vertikal dan horizontal. Integritas nasional secara vertikal maksudnya bagaimana untuk mempersatukan antara pemerintah pusat dengan rakyat yang tersebar dalam suatu wilayah yang sangat luas. Ada hubungan yang harmonis yang terjalin antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sedangkan integritas nasional yang bersifat horizontal berbicara tentang bagaimana mempersatukan keberagaman atau kemajemukan yang ada di tengah masyarakat.

### ***Pendidikan Kewarganegaraan yang berkarakter Pancasila***

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter hendaknya meletakkan Pancasila sebagai sumber karakter bangsa. Meletakkan Pancasila sebagai sumber karakter bertujuan untuk membangun karakter warga negara menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mengarah kepada pendidikan watak Pancasila bagi warga negara Indonesia (Al Muchtar, 2019: 5). Pendidikan Kewarganegaraan yang berkarakter Pancasila memuat nilai spiritual yang tinggi yang diyakini kebenarannya, dipatuhi, dan dihormati oleh masyarakat pendukungnya. Muatan karakter Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan sudah merupakan tuntutan dan konsekuensi atas keberagaman bangsa Indonesia ini. Pancasila sebagai ideologi merupakan acuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga setiap perilaku warga negara dituntut untuk konsisten terhadap substansi nilai-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila, terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang mendasari, meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya daripada Pancasila.

#### ***Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai***

Di dalam pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Hal pendidikan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pendidikan memegang peranan yang penting dalam mempengaruhi perkembangan dan pembentukan peserta didik agar dapat bermanfaat bagi dirinya, maupun masyarakat secara luas.

Penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata mentransfer ilmu dan pengetahuan serta teknologi kepada peserta didik. Namun pendidikan harus mampu membangun bangsa yang beradab, bermoral, dan berakhlak mulia, yang tidak hanya diukur dari segi kecerdasan akademik semata, tetapi juga diperlukan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan moral (Aeni, 2018: 2)

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka mutlak diperlukan pendidikan nilai secara menyeluruh. Menurut Thomas Lickona, Pendidikan nilai adalah Sarana yang dapat diandalkan dalam kehidupan bersama yang demokratis, sehingga kualitas hidup manusia menjadi lebih baik lagi. (Aeni, 2018: 47)

Konsep karakter baik (*good character*) pertama kali dipopulerkan oleh Thomas Lickona yaitu merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai “...*the life of right conduct – right conduct in relation to other persons and in relation to oneself*” atau kehidupan berperilaku baik/penuh kebajikan, yakni perilaku baik terhadap pihak lain (Tuhan yang Maha Esa, manusia, dan alam semesta) dan terhadap diri sendiri Budimansyah (2010:37-38).

Lebih lanjut Thomas Lickona membagi kehidupan yang penuh kebajikan ke dalam dua kategori, yakni kebajikan terhadap diri sendiri (*self-oriented virtuous*) seperti pengendalian diri (*self control*) dan kesabaran (*moderation*); dan kebajikan terhadap orang lain (*other-oriented virtuous*), seperti kesediaan berbagi (*generosity*) dan merasakan kebaikan (*compassion*) (Aeni, 2018: 65)

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan karakter memiliki peran yang strategis dalam membangun wawasan kebangsaan dengan penguatan nilai-nilai yang dijadikan sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya penguatan nilai sila Ketuhanan yang Maha Esa.

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

Dengan adanya matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjaga dan meneruskan cita-cita pembangunan bangsa dengan sungguh-sungguh mencintai bangsanya sendiri, dengan tidak membedakan setiap suku, ras, maupun agama yang mendiami Nusantara ini. Dengan wawasan kebangsaan dan juga semangat nasionalisme maka hal ini diharapkan dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terpecah (Sofyan, Sundawa, 2015: 3)

Dengan demikian, pemahaman konsep wawasan kebangsaan harus secara terus menerus dilakukan dari satu generasi ke generasi berikutnya mengingat kondisi sekarang ini semangat kebangsaan sudah mengalami penurunan secara kualitas (Utami, Cahyono, 2019: 88)

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai tentu materi pembelajarannya berkaitan sekali dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila

Pancasila yang sudah berurat berakar dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, merupakan suatu totalitas yang meskipun masing-masing silanya mempunyai fungsi yang berbeda dalam kehidupan kenegaraan tetapi tidak saling bertentangan melainkan saling melengkapi satu dengan lainnya.

#### ***Makna Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa***

Pemahaman akan nilai Ketuhanan dalam Pancasila belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di beberapa tempat masih ada perilaku orang yang tidak menghormati penganut kepercayaan atau agama yang lain. Pemahaman akan agamanya yang sempit menganggap yang beda adalah musuh. Hal inilah yang kemudian sering menyebabkan terjadinya gesekan sosial dan berujung pada perusakan rumah ibadah (Saragih, 2018: 4)

Lebih lanjut Saragih menegaskan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk saling menghargai, menyayangi, mengayomi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yakni:

- a) Keyakinan terhadap adanya Tuhan dengan sifat-sifatnya yang Mahasempurna.
- b) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara menjalankan semua perintah-Nya dan sekaligus menjauhi segala larangan-Nya.
- c) Saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda.
- d) Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya (Saragih, 2018: 6)

Dari apa yang disampaikan Saragih di atas tentang keimanan dan ketakwaan manusia terhadap Tuhannya adalah dilihat dari ketaatannya dalam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-Nya. Salah satu perintahnya tentu agar manusia bersikap toleransi terhadap sesamanya yang beda keyakinan.

Menurut Notonagoro secara rinci pemahaman tentang arti sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang abstrak umum

universal dapat dilihat dari rumusan intinya:

“sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan se bagai sebab yang pertama dari segala sesuatu atau causa prima. Sebab yang pertama adalah ada yang selama-lamanya atau abadi, ada-Nya merupakan keharusan, dalam arti mutlak, yaitu ada yang mutlak. Sebab yang pertama hanya ada satu, merupakan asal mula segala sesuatu, segala sesuatu yang tergantung pada-Nya, jadi sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, serta pengatur tata tertib alam, sehingga wajib ditaklami dan ditaati.

Kesesuaian adalah hubungan yang mempunyai sifat dan keharusan mutlak antara negara Indonesia sebagai akibat dengan Tuhan sebagai sebabnya. Ada hubungan yang langsung, yaitu disebutkan pada Proklamasi Kemerdekaan dan alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada hubungan mutlak yang tidak langsung antara negara Indonesia dengan Tuhan sebagai sebabnya yang tidak langsung, yaitu melalui manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan. Pertentangan dalam hal ke-Tuhanan, sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan anti keagamaan, paksaan agama tidak dimungkinkan adanya, sehingga di negara Indonesia seharusnya hanya ada toleransi yang sejati” (Notonagoro, 1980: 74)

Dari apa yang disampaikan oleh Notonagoro di atas dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi tidak akan mengarah kepada pembentukan negara agama, yang berdasarkan atas suatu agama tertentu saja. Namun tidak berarti melepaskan sama sekali agama dalam kehidupan kenegaraan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dengan hukum Tuhan.

Bung Karno, dalam pidatonya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai dasar bagi Indonesia merdeka menegaskan:

“Prinsip Ketuhanan; bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk nabi Muhammad s.a.w., orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat mneyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Setiap rakyat Indonesia ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme agama’. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan” (Laku, 2012: 97)

Dari pernyataan Bung Karno tersebut dapat disimpulkan bahwa keyakinan akan agama dan Tuhan merupakan hak pribadi setiap warga negara yang tidak bisa dipaksakan darimanapun juga. Bung Karno juga menyampaikan bahwa sikap saling menghargai dan menghormati harus ditunjukkan oleh setiap warga negara sebagai cara hidup bangsa yang beradab, sebagaimana dikemukakannya:

“Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain, Nabi Muhammad s.a.w. telah memberikan bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku berpesta raya jikalau saudara-

saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Laku, 2012: 98)

Dari pernyataan Bung Karno tersebut dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha menghendaki adanya sikap saling menghormati dan menghargai di antara umat beragama.

Ketuhanan yang Maha Esa merupakan hal yang mendasar dan terpenting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini tidaklah berlebihan karena perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme dan mencapai kemerdekaannya tidak semata-mata hasil perjuangan saja tetapi ada campur tangan Tuhan didalamnya. Perjuangan yang diberkati Tuhan.

Pandangan Muhammad Hatta tentang gagasan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah gagasan atau ide yang mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama dan keyakinan. Meskipun berbeda secara agama namun tujuan dari setiap agama adalah sama yaitu berjuang untuk mencapai kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kejujuran. Bahkan Bung Hatta meyakini bahwa prinsip fundamental tidak akan menghantarkan bangsa Indonesia kepada tujuan dalam beragama tadi (Laku, 2012: 102)

Menurut Budimansyah (2010: 46) perilaku bangsa Indonesia yang memiliki nilai Ketuhanan atau ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah

“bentuk kesadaran dan perilaku iman dan takwa serta akhlak mulia sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter ber-Ketuhanan yang Maha Esa tercermin antara lain hormat dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan; saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu; tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain”.

Dari pernyataan Budimansyah tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik hidup bangsa Indonesia adalah pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penuh rasa toleransi terhadap pemeluk agama yang lain. Penerapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam praksis kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia memang tidaklah gampang. Banyak masalah yang muncul ketika prinsip *ideal-teoritis* itu hendak diwujudkan dalam kehidupan bersama. Antara yang diinginkan dengan kenyataannya tidaklah sejalan.

Tuhan menciptakan manusia bukan untuk saling bermusuhan tetapi untuk saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati saling tolong menolong dalam kebaikan satu sama lainnya, pribadi yang satu terhadap pribadi yang lainnya.

Di dalam pemahaman agama Islam, sebagaimana terdapat dalam (QS. Al-Qashash: 77) dinyatakan:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

Kerangka pandang Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamiin*, toleran, menghormati hak asasi manusia dan emansipatoris telah merangsang berkembangnya sikap positif terhadap perbedaan yang terdapat dalam kehidupan manusia. Islam adalah rahmat bagi semesta, agama yang membawa kebaikan, dan cinta kasih kepada semesta. Sikap ramah dan lemah lembut kepada sesama membuat hidup terasa lebih indah.

Dalam QS. Ali Imran: 159 dinyatakan:

Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap

keras dan berhati-hati, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Dalam Pemahaman agama Nasrani tentang kasih dinyatakan dalam Al-Kitab (Matius 22: 39) berbunyi :

Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”.

Kasih dapat menyatukan umat manusia yang dibatasi oleh wilayah geografi, adat, sosial budaya, politik, dan agama. Kasih menjadi senjata untuk menghilangkan segala perbedaan dan konflik serta mengatasi fanatisme agama, suku bangsa, kelompok atau golongan. Kasih Tuhan tidak membangun tembok, kasih Tuhan justru membangun jembatan. Kekerasan tidak pernah efektif dalam menyelesaikan persoalan, tetapi kekuatan oral spiritual dalam wujud kasih justru akan menciptakan kedamaian, kesehatan dan kebersamaan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kasih itu memiliki ciri-ciri antara lain lemah lembut, murah hati, mau memaafkan, dan tidak sombong.

Kasih itu anugerah Tuhan keadaan umat manusia untuk menciptakan damai di atas muka bumi yang diliputi ketenangan, ketentraman, saling menghargai meskipun beda satu sama yang lain.

Pada dasarnya semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga di hadapan Tuhan semua umat manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, yang membedakan satu atas lainnya hanyalah amal perbuatannya.

Menurut Al-Quran dalam (QS. Al-Hujurat: 13), dinyatakan

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”

Dalam Al-Kitab (Kejadian 1: 27)

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya dalam (Kejadian 1: 28)

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”.

Dalam filsafat Pancasila, sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila yang paling umum dan paling mendasar yang meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila-sila berikutnya merupakan bentuk pengkhususan dari sila sebelumnya. Meskipun masing-masing sila memiliki fungsi yang berbeda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi tidak saling bertentangan justru saling melengkapi demi tercapainya suatu tujuan.

### ***Wawasan kebangsaan yang religius***

Berkaitan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, wawasan kebangsaan dituntut memuat nilai-nilai dasar yang diilhami iman dan takwa yang keluar dari hati nurani, menghargai harkat martabat manusia, mewujudkan solidaritas sosial, menjunjung tinggi demokrasi, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Wawasan kebangsaan dewasa ini dituntut pula untuk menghargai hak-hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Wawasan kebangsaan Indonesia yang religius merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang senantiasa harus disyukuri.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan wawasan kebangsaan yang religius dirasakan sebagai usaha yang mendesak untuk mengatasi kemunduran penghayatan dan pengamalan wawasan tersebut terutama sebagai akibat proses sosial yang terjadi selama ini. Pendidikan wawasan kebangsaan yang religius diperlukan sebagai pendidikan yang mampu menumbuh-kembangkan pemahaman, sikap, dan tekad yang seimbang, antisipatif, dan dialogis terhadap lingkungan alam, sosio-kultural, maupun diri sendiri.

Sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia pada dasarnya Pancasila dapat dijadikan sebagai instrumen utama dalam menumbuh-kembangkan wawasan kebangsaan Indonesia. Sebagai instrumen Pancasila akan selalu melekat sepanjang masa sejalan dengan keberadaan dan gerak naik dan turunnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Melalui pendekatan religius ini diharapkan implementasi nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama dalam mengembangkan wawasan kebangsaan Indonesia atau nasionalisme akan berlangsung secara efektif, sejalan dengan dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat (Martodirdjo, 2008: 13)

Wawasan kebangsaan Indonesia hendaknya berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila Ketuhanan yang Maha Esa yang mengajarkan relasi manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Pemahaman yang mendalam akan ajaran sila pertama akan memunculkan sikap dan watak untuk lebih mengasihi dan menyayangi sesama meskipun secara keyakinan berbeda, sebaliknya pemahaman akan ajaran sila pertama yang dangkal akan menganggap perbedaan keyakinan itu sebagai lawan atau musuhnya yang pada akhirnya memunculkan eksklusivitas agama dan kepercayaan. Perbedaan yang ada hendaknya disikapi secara inklusif, sehingga tidak akan rasa ada permusuhan

diantara golongan ras, agama, dan suku yang ada (Arifudin, 2007: 3)

Pemahaman nilai Ketuhanan secara benar akan menimbulkan kesadaran bahwa perbedaan yang ada itu adalah anugerah dan karya Tuhan yang indah, maka harus diterima dengan sukacita. Perbedaan memang tidak bisa disamakan tetapi perbedaan bisa disatukan (*unity in diversity*).

Sebagai bangsa yang religius tentunya harus memahami dan meyakini bahwa nilai Ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila dapat menjadi perekat keutuhan bangsa. Permasalahan atau ancaman disintegrasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia harus mendapat perhatian yang serius.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, khususnya nilai Ketuhanan dapat dijadikan landasan dalam membangun wawasan kebangsaan yang dapat mempersatukan bangsa di tengah perbedaan. Perbedaan memang tidak bisa disamakan atau diseragamkan tetapi dapat dipersatukan.

## SIMPULAN

Keberagaman bangsa Indonesia merupakan anugerah yang terindah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Maka sebagai bangsa yang religius, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa dilepaskan dalam relasi antar umat beragama maupun antar umat seagama. Kondisi bangsa yang beragam ini berpotensi untuk menyebabkan timbulnya konflik horisontal di antara anggota masyarakat, dimana keberagaman itu sendiri dijadikan sebagai isu adanya konflik.

Gesekan dan konflik sosial masih saja terjadi di Indonesia. Perbedaan keyakinan agama sering menjadi pemicu utama adanya konflik. Hal ini disebabkan pemahaman akan nilai Ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila belum dipahami secara benar.

Dengan Membangun wawasan kebangsaan yang religius akan menciptakan rasa cinta kasih terhadap sesama, mengabaikan

perbedaan yang ada, karena pada dasarnya tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kebencian, kekerasan atau permusuhan terhadap sesamanya. Keberagaman janganlah dipandang sebagai suatu ancaman untuk terjadinya disintegrasi bangsa maupun wilayah justru untuk memperkaya khasanah budaya bangsa.

Upaya untuk membangun wawasan kebangsaan yang religius ini dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan karakter Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai menjadikan nilai sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan berpijak utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berkarakter Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan penanaman nilai Ketuhanan dapat mewujudkan integrasi nasional

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Al-Kitab

Al-Quran

Aeni, A.N. (2018). *“Pendidikan Nilai, Moral, dan Karakter”*. Bandung: UPI Press.

Al Muchtar, S. (2015). *“Dasar Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.

Budimansyah, D. (2010). *“Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa”*. Bandung: Widya Aksara Press.

Laku, S.K. (2012) *“Pancasila Kekuatan Pembebas: Nilai Filosofis Sila I”* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Muhammad Amin, M. (2015). *“Moral Pancasila Jati Diri Bangsa: Aktualisasi Ucapan dan Perilaku Bermoral Pancasila”*. Yogyakarta: Calpulis.

Notonagoro. (1980). *“Pancasila Secara Ilmiah Populer”*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

Suhady, I., Sinaga, AM. (2006). *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

##### Jurnal

Amirin, T.M. (2012). Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. 1(1), pp: 1-16. DOI: <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/1047>

Arifudin, I. (2007). Urgensi Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan INSANIA*. 12(2), pp: 1-9. DOI: <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/view/252>

Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 28(1), pp: 31-37. DOI: <http://training.um.ac.id/ojs/index.php/jppk/article/view/5437>

Martodirdjo, HS. (2008). Implementasi Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Ketahanan Nasional*. 13(2), pp: 1-13. DOI : <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22127>

Saragih, E.S., (2018). Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Indonesia. *Jurnal Teologi “Cultivation”*. 2 (1), pp: 1-12. DOI: <http://jurnal.stakpntarutung.ac.id/index.php/Jurnal-Teologi-Cultivation>.

Silaban, W. (2012). Pemikiran Soekarno tentang Nasionalisme. *Jurnal Dinamika Politik*. 1(3), pp: 1-6. DOI: [file:///C:/Users/user/Downloads/1034-2924-1-PB%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1034-2924-1-PB%20(4).pdf)

Sofyan, F.S. dan Sundawa, Dadang. (2015). Hubungan mata Kuliah Pendidikan

- Kewarganegaraan Dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa. *JPIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)* 24(2), pp: 185-199. DOI: <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/1455>
- Tarigan, R.V. (2006). Multikulturalisme: Dari Lingkup Keluarga Hingga Media Massa. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*. 2(1), pp: 40-42. DOI: <https://s3.amazonaws.com/academia.edu/documents/33273986/>
- Utami, P.S. dan Cahyono, H. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Kemuhammadiyah Berbasis Wawasan Kebangsaan Pada Program Studi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *JPE (Jurnal Pendidikan Edutama)* 6(1), pp: 87-98 DOI : <https://ejournal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE/article/view/442>
- Prosiding**
- Utami, P.S. dan Cahyono, H. (2017, 28 Agustus). *Model Pendidikan Berbasis Multikultural Pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. Paper presented in: Seminar Nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan III “Pendidikan Karakter di Era Teknologi Informasi Dalam Bingkai Multikultural. Retrived from <http://eprints.umpo.ac.id/4602/>